

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLITAR**  
**KABUPATEN BLITAR**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan tahun 2013 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2013 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 0,- mencapai 0 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. **30.256.780.202,-** atau mencapai 88,12 % dari anggarannya.

**b. Laporan Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2013 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar **Rp. 30.558.671.809,-** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp. 118.250.336,-**, investasi jangka panjang sebesar **Rp. 0,-** aset tetap sebesar Rp. **30.341.521.473,-** dana cadangan **Rp. 0,-** dan aset lainnya sebesar Rp. **98.900.000,-**

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar **Rp. 0,-** yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar **Rp.0**, dan kewajiban jangka panjang sebesar **Rp. 0,-**

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar **Rp.30.558.671.809,-** yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar **Rp.118.250.336,-** ekuitas dana investasi sebesar **Rp.30.440.421.473,-**, dan ekuitas dana cadangan sebesar **Rp.0,-**

### **c. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/A);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 38/A);

### **1.3. Usur Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2013 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di **Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar**, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

#### **2.3 Program Pencapaian Target Kinerja**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2013, Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, mempunyai 6 program dalam urusan pelayanan, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporanm Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 secara keseluruhan sebesar Rp 34.336.111.104,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	28.273.119.104,00
2	Belanja Modal	6.062.992.000,00
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>34.336.111.104,00</b>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 Nomor 6 tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp.34.336.111.104,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp.34.336.111.104,00.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar selama tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Belanja	34.336.111.104,00	30.256.780.202,00	88,12
	- <i>Belanja Operasi</i>	28.273.119.104,00	24.788.753.454,00	87,68
	- <i>Belanja Modal</i>	6.062.992.000,00	5.468.026.748,00	90,19
	- <i>Belanja Tak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>34.336.111.104,00</b>	<b>30.256.780.202,00</b>	<b>88,12</b>

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**3.1.1. Belanja Daerah**

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2013 sebesar Rp.30.256.780.202,00 atau 88,12 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.4.079.330.902,00 atau 11,88 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
	Belanja Tidak Langsung	3.067.280.804	2.909.578.840	94,86
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
•	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.709.570.700	1.353.326.096	79.16
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
•	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.106.505.000	6.314.014.297	88.85
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			
•	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	252.986.000	243.950.000	96.43
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
•	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000	-	0.00
•	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	623.150.000	498.706.479	80.03
•	Sosialisasi Program Kerja Melalui Media Massa	474.046.400	473.085.000	99.80
•	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan	567.300.200	508.633.535	89.66
•	Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokoleran	147.154.500	145.357.400	98.78
•	Bimbingan Teknis Mekanisme Pengaduan Masyarakat	147.500.000	145.445.000	98.61
•	Pengolahan data dan analisis komisi pengaduan masyarakat	273.355.000	266.025.750	97.32
•	Penyusunan Renja dan Program Setwan-DPRD tahun 2014	189.800.000	182.428.164	96.12
•	Penyusunan dan Evaluasi Standar	261.907.000	245.849.817	93.87

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	Operasional dan Prosedur (SOP)			
•	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan program Setwan - DPRD tahun 2013	214.607.000	160.201.080	74.65
•	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum	134.721.000	127.658.000	94.76
•	Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP)	148.144.000	36.515.183	24.65
•	Kajian dan Analisis APBD	180.844.000	174.901.000	96.71
•	Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan	282.888.000	84.290.100	29.80
•	Pembuatan Profil DPRD	232.806.500	145.700.210	62.58
•	Pembuatan dan pengelolaan Tabloid/Buletin/Majalah DPRD	119.476.500	65.237.500	54.60
•	Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Renja dan Lakip Tahun 2014	320.205.000	317.724.670	99.23
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
•	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.567.000	963.925	3.50
	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>			
•	Rapat konsultasi dan Koordinasi anggota DPRD	349.583.000	333.689.885	95.45
•	Rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar	288.229.000	203.395.650	70.57
•	Kegiatan Reses	672.000.000	656.736.000	97.73
•	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (LEMHANAS)	295.080.000	292.550.300	99.14
•	Penyediaan dan fasilitasi Staf/Tenaga Ahli	2.150.700	-	0.00

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	DPRD			
•	Pembahasan, perumpunan dan harmonisasi kajian akademis/ naskah akademis dan Ranperda yang dibahas pada tahun 2013	357.900.000	339.795.809	94.94
•	Pendalaman Tugas Anggota DPRD	623.123.000	600.052.550	96.30
•	Pembahasan Perubahan APBD tahun 2013	454.530.000	440.673.350	96.95
•	Pembahasan Ranperda Pansus I	240.200.000	238.159.700	99.15
•	Pembahasan Ranperda Pansus II	436.321.000	419.413.866	96.13
•	Pembahasan Ranperda Pansus III	232.607.000	228.632.000	98.29
•	Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I	307.650.000	300.654.050	97.73
•	Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi II	278.400.000	267.355.820	96.03
•	Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi III	324.300.000	285.899.565	88.16
•	Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi IV	323.850.000	302.011.900	93.26
•	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012	376.295.000	368.904.850	98.04
•	Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2013	413.140.000	384.067.990	92.96
•	Pembahasan R-APBD tahun 2014	363.269.270	259.978.650	71.57
•	Pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2014	388.005.000	371.601.472	95.77
•	Pansus/Panja Pembahasan Laporan Keuangan Daerah tahun 2012 yang telah diperiksa BPK-RI	179.745.000	169.390.400	94.24
•	Pembahasan RKA R-APBD tahun 2014 SKPD Mitra Komisi I	113.355.000	105.404.300	92.99
•	Pembahasan RKA R-APBD tahun 2014 SKPD Mitra Komisi II	104.875.000	95.304.600	90.87
•	Pembahasan RKA R-APBD tahun 2014 SKPD Mitra Komisi III	108.436.900	101.015.000	93.16
•	Pembahasan RKA R-APBD tahun 2014	108.300.000	82.201.000	75.90

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	SKPD Mitra Komisi IV			
•	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	245.607.000	243.159.060	99.00
•	Penyusunan dan Pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2014	371.221.000	347.178.917	93.52
•	Pembahasan Renja dan Program Setwan - DPRD tahun 2014	231.781.000	226.975.990	97.93
•	Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ agama	16.637.900	-	0.00
•	Program Kerja Tim Monitoring LHP/LKD	312.745.000	302.953.400	96.87
•	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Badan Musyawarah	820.443.000	820.375.070	99.99
•	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Badan Legislasi	174.721.000	157.809.464	90.32
•	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Badan Anggaran	232.395.000	224.771.450	96.72
•	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Badan Kehormatan	234.721.000	217.037.100	92.47
•	Kegiatan Pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik	89.721.000	77.004.450	85.83
•	Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan DPRD	99.895.000	3.600.000	3.60
•	Pengawasan Program Kerja SKPD Mitra Komisi I	139.430.000	87.355.000	62.65
•	Pengawasan Program Kerja SKPD Mitra Komisi II	99.725.000	87.785.500	88.03
•	Pengawasan Program Kerja SKPD Mitra Komisi III	99.436.900	9.995.000	10.05
•	Pengawasan Program Kerja SKPD Mitra Komisi IV	99.389.330	81.752.600	82.25

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
•	Pendalaman Tugas Badan Anggaran tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014	419.852.000	360.116.350	85.77
•	Pendalaman Tugas Badan Musyawarah	307.615.500	265.781.600	86.40
•	Pendalaman Tugas Badan Legislasi	234.721.000	197.987.000	84.35
•	Pendalaman Tugas Komisi I	233.930.000	224.355.400	95.91
•	Pendalaman Tugas Komisi II	228.004.000	217.365.900	95.33
•	Pendalaman Tugas Komisi III	229.436.900	199.579.100	86.99
•	Pendalaman Tugas Komisi IV	216.200.000	176.073.350	81.44
•	Pendalaman Tugas Panja-Pansus LHP/LKD	180.435.000	177.798.200	98.54
•	Pendalaman Tugas Badan Kehormatan	104.721.000	88.109.900	84.14
•	Kegiatan dan Penyusunan Kajian Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi I tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Blitar	448.760.000	406.572.500	90.60
•	Kegiatan dan Penyusunan Kajian Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi II tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Menengah dan Kecil	299.400.000	284.808.900	95.13
•	Kegiatan dan Penyusunan Kajian Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi III tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi	395.436.900	317.202.300	80.22
•	Kegiatan dan Penyusunan Kajian Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi IV tentang Dana Bantuan Bencana	298.000.000	257.960.200	86.56
•	Fasilitasi Penyelesaian Tukar Guling Tanah dengan Perhutani	209.260.000	187.651.400	89.67
•	Fasilitasi Badan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Masalah Spesifik	404.290.000	270.695.450	66.95
•	Fasilitasi Komisi I dalam rangka Penyelesaian Masalah Spesifik	250.000.000	237.749.650	95.10
•	Fasilitasi Komisi II dalam rangka	285.000.000	274.592.849	96.35

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	Penyelesaian Masalah Spesifik			
•	Fasilitasi Komisi III dalam rangka Penyelesaian Masalah Spesifik	290.000.000	265.297.900	91.48
•	Fasilitasi Komisi IV dalam rangka Penyelesaian Masalah Spesifik	250.000.000	228.654.300	91.46
•	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Blitar	103.476.500	85.500.000	82.63
•	Fasilitasi Fraksi-fraksi DPRD	211.380.000	207.350.000	98.09
•	Rapat konsultasi dan koordinasi Ketua DPRD	199.837.000	178.619.150	89.38
•	Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua I DPRD	203.837.000	161.677.485	79.32
•	Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua II DPRD	204.837.000	163.177.865	79.66
•	Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua III DPRD	174.837.000	159.583.900	91.28
•	Pendalaman Tugas Ketua DPRD	196.641.100	81.846.100	41.62
•	Pendalaman Tugas Wakil Ketua I DPRD	152.395.000	87.394.950	57.35
•	Pendalaman Tugas Wakil Ketua II DPRD	152.384.500	91.489.299	60.04
•	Pendalaman Tugas Wakil Ketua III DPRD	152.395.000	96.610.300	63.39
•	Pansus RTRW Lanjutan	177.000.100	161.945.150	91.49
•	Pansus Kegiatan Tahun Jamak	-	-	0.00
•	Peningkatan Motivasi Pimpinan dan Anggota DPRD	26.000.000	9.000.000	34.62
•	<b>JUMLAH</b>	<b>34.336.111.104</b>	<b>30.256.780.202</b>	<b>88,12</b>

### **3.2 Hambatan dan Kendala**

Secara umum hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Belum samanya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

##### **1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

###### **a. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

###### **b. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

###### **c. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

#### d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

##### 1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

##### 2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

### **3) Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

### **4) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

### **5) Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

#### **6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

#### **7) Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

#### **8) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya

rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

**e. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

**f. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

**4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

		<b>31 Desember 2013</b>	<b>31 Desember 2012</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>a. Aset</b>		<b>30.558.671.809,00</b>	<b>25.083.774.975,00</b>
	Saldo Aset SKPD ... Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(1)	Aset Lancar	118.250.336,00	48.722.700,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	30.341.521.473,00	24.936.152.275,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	98.900.000,00	98.900.000,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>30.558.671.809,00</b>	<b>25.083.774.975,00</b>

		<b>31 Desember 2013</b>	<b>31 Desember 2012</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1) Aset Lancar</b>		<b>118.250.336,00</b>	<b>48.722.700,00</b>
	Saldo Aset Lancar SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar 118.250.336,00, dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	118.250.336,00	48.722.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>118.250.336,00</b>	<b>48.722.700,00</b>

		<b>31 Desember 2013</b>	<b>31 Desember 2012</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(a) Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
<b>(b) Piutang Retribusi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Piutang Retribusi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00 terdiri dari NIHIL dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	NIHIL	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
<b>(c) Piutang lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo piutang lain-lain SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	NIHIL	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
<b>(d) Persediaan</b>	<b>118.250.336,00</b>	<b>48.722.700,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2013 sebesar Rp118.250.336,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	53.727.136,00
(2)	Buku Cetak	24.073.200,00
(3)	Persediaan Map	30.690.000,00
(4)	Persediaan Kertas Kop	1.600.000,00
(5)	Persediaan Amplop	840.000,00
(6)	Persediaan plakat/Vandel	2.820.000,00
(7)	Persediaan Tas Buah Tangan	4.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>118.250.336,00</b>

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
<b>2) Investasi Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
<b>3) Aset Tetap</b>	<b>30.341.521.473,00</b>	<b>24.936.152.275,00</b>

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 24.936.152.275,00 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 30.341.521.473,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(a)	Tanah	13.345.600.000,00	13.345.600.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	13.758.912.223,00	8.454.784.025,00
(c)	Gedung dan Bangunan	2.727.010.350,00	2.691.107.350,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	467.190.500,00	425.182.500,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	42.808.400,00	19.478.400,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>30.341.521.473,00</b>	<b>24.936.152.275,00</b>

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2012 sebesar 5.405.369.198,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2012 (Rp. **30.341.521.473,00** – Rp. **24.936.152.275,00**) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
<b>(a) Tanah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Tanah SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 13.345.600.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo awal</b>			
	Tanah Kantor	Rp.	13.345.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.345.600.000,00</b>
<b>Penambahan</b>			
	Tanah kantor	Rp.	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
<b>Penyesuaian/Koreksi</b>			
	Tanah Kantor	Rp.	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
<b>Penghapusan/Pengurangan</b>			
	Tanah Kantor	Rp.	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Saldo akhir</b>			
	Tanah Kantor	Rp.	13.345.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>(13.345.600.000,,00)</b>

➤ Penambahan Aset Tanah tahun 2013 sebesar Rp 0,00

	<b>31 Desember 2013</b>	<b>31 Desember 2012</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(b) Peralatan dan Mesin</b>	<b>13.758.912.223,00</b>	<b>8.454.784.025,00</b>

<b>Saldo awal</b>	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan	Rp. 394.670.000
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp. 5.610.894.750
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pickup	Rp. 122.000.000
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 435.197.750
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Gerobak	Rp. 1.475.000
Alat-alat pengemasan Pertanian/Peternakan	Rp. 1.200.000
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp. 9.055.000
Peralatan Kantor Mesin Hitung	Rp. 1.785.000
Peralatan Kantor Mesin Stensil	Rp. 2.400.000
Peralatan Kantor Mesin Fotocopy	Rp. 21.737.500
Peralatan Kantor Mesin Potong Kertas	Rp. 220.000
Peralatan Kantor Mesin Penghancur Kertas	Rp. 18.600.000
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp. 24.925.000
Baliho	Rp. 9.403.500
Perlengkapan Kantor Almari	Rp. 61.447.200
Perlengkapan Kantor Brankas	Rp. 7.750.000
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp. 33.917.500
Perlengkapan Kantor White Board	Rp. 3.955.000
Billboard/Papan Nama	Rp. 14.432.626
Air Conditioner (AC)	Rp. 55.800.000
Kipas Angin	Rp. 2.323.211
Vacum Cleaner	Rp. 5.001.875
Papan Pengumuman	Rp. 21.505.000
Perlengkapan Kantor Lainnya	Rp. 552.000
Komputer PC	Rp. 299.355.667
Komputer Laptop	Rp. 504.120.218
Printer	Rp. 38.938.218
Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard, Eksternal Hardisk dll)	Rp. 11.700.000
Modem	Rp. 600.000
Meja kerja	Rp. 31.500.267
Meja rapat	Rp. 64.192.000
Kursi kerja	Rp. 39.797.493
Kursi rapat	Rp. 35.040.000
Tempat tidur	Rp. 2.577.000
Sofa	Rp. 34.737.000
Rak buku/tv/kembang	Rp. 462.000
Mebelair Lainnya	Rp. 6.560.000
Tabung gas	Rp. 200.000
Kompor gas	Rp. 1.025.000
Lemari makan	Rp. 1.480.000

Dispenser	Rp.	3.726.000
Rak piring	Rp.	3.940.000
Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	Rp.	4.547.250
Peralatan Dapur Lainnya	Rp.	38.000.000
Jam dinding/meja	Rp.	5.719.000
Karpet	Rp.	950.000
Korden	Rp.	2.242.800
TV	Rp.	15.391.000
Kipas Angin	Rp.	560.000
AC	Rp.	23.250.000
Pigora	Rp.	1.280.000
Tape	Rp.	4.920.000
Kamera	Rp.	81.976.000
Handycam	Rp.	77.427.500
Proyektor	Rp.	72.637.700
Amplifier/Mixer Audio	Rp.	85.109.500
Pengeras Suara	Rp.	2.160.000
Alat-alat Studio Lainnya	Rp.	44.003.500
Telepon	Rp.	2.085.000
Faximili	Rp.	1.773.000
Radio HF/FM (handy talkie)	Rp.	3.900.000
Alat-alat Komunikasi Lainnya	Rp.	1.550.000
Alat Ukur Ketebalan	Rp.	44.858.000
Sentolop/senter	Rp.	245.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>8.454.784.025</b>
<b>Penambahan</b>		
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp.	2.812.710.000
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp.	105.843.198
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Gerobak	Rp.	9.000.000
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp.	3.000.000
Peralatan Kantor Mesin Penghancur Kertas	Rp.	29.280.000
Peralatan Kantor Tabung Pemadam Kebakaran	Rp.	88.166.000
Perlengkapan Kantor Almari	Rp.	247.740.000
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp.	32.000.000
Perlengkapan Kantor White Board	Rp.	9.800.000
Perlengkapan Kantor Rak Buku	Rp.	23.400.000
Billboard/Papan Nama	Rp.	59.927.340
Perlengkapan Kantor Lainnya	Rp.	17.000.000
Komputer PC	Rp.	107.290.000
Komputer Laptop	Rp.	161.332.000
Printer	Rp.	20.050.000
Meja kerja	Rp.	54.670.000
Meja rapat	Rp.	61.600.000
Kursi kerja	Rp.	136.055.000
Sofa	Rp.	50.850.000
Kompor gas	Rp.	750.000
Dispenser	Rp.	3.240.000

Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	Rp.	20.419.550
Jam dinding/Meja	Rp.	8.750.000
Karpet	Rp.	199.375.000
Korden	Rp.	305.690.000
TV	Rp.	29.250.000
Alat-alat Rumah Tangga Lainnya	Rp.	9.850.000
Kamera	Rp.	194.923.000
Proyektor	Rp.	163.312.160
Microphone	Rp.	374.385.000
Radio HF/FM (handy talkie)	Rp.	22.500.000
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>5.345.158.248</b>
<b>Penyesuaian /Koreksi</b>		
Dispenser	Rp.	(1.240.000)
Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	Rp.	(19.825.050)
Jam dinding/meja	Rp.	(8.750.000)
Korden	Rp.	(28.215.000)
Perlengkapan Kantor Lainnya	Rp.	17.000.000
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>(41.030.050)</b>
<b>Penghapusan/Pengurangan</b>		
-	Rp.	0
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>0</b>
<b>Saldo Akhir</b>		
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan	Rp.	394.670.000
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp.	8.423.604.750
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pickup	Rp.	122.000.000
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp.	541.040.948
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Gerobak	Rp.	10.475.000
Alat-alat pengemasan Pertanian/Peternakan	Rp.	1.200.000
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp.	12.055.000
Peralatan Kantor Mesin Hitung	Rp.	1.785.000
Peralatan Kantor Mesin Stensil	Rp.	2.400.000
Peralatan Kantor Mesin Fotocopy	Rp.	21.737.500
Peralatan Kantor Mesin Potong Kertas	Rp.	220.000
Peralatan Kantor Mesin Penghancur Kertas	Rp.	47.880.000
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp.	24.925.000
Peralatan Kantor Tabung Pemadam Kebakaran	Rp.	88.166.000
Baliho	Rp.	9.403.500
Perlengkapan Kantor Almari	Rp.	309.187.200
Perlengkapan Kantor Brankas	Rp.	7.750.000
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp.	65.917.500
Perlengkapan Kantor White Board	Rp.	13.755.000
Perlengkapan Kantor Rak Buku	Rp.	23.400.000
Billboard/Papan Nama	Rp.	74.359.966
Air Conditioner (AC)	Rp.	55.800.000
Kipas Angin	Rp.	2.323.211
Vacum Cleaner	Rp.	5.001.875
Papan Pengumuman	Rp.	21.505.000

Perlengkapan Kantor Lainnya	Rp.	17.552.000
Komputer PC	Rp.	406.645.667
Komputer Laptop	Rp.	665.452.218
Printer	Rp.	58.988.218
Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard, Eksternal Hardisk dll)	Rp.	11.700.000
Modem	Rp.	600.000
Meja kerja	Rp.	86.170.267
Meja rapat	Rp.	125.792.000
Kursi kerja	Rp.	175.852.493
Kursi rapat	Rp.	35.040.000
Tempat tidur	Rp.	2.577.000
Sofa	Rp.	85.587.000
Rak buku/tv/kembang	Rp.	462.000
Mebelair Lainnya	Rp.	6.560.000
Tabung gas	Rp.	200.000
Kompor gas	Rp.	1.775.000
Lemari makan	Rp.	1.480.000
Dispenser	Rp.	5.726.000
Rak piring	Rp.	3.940.000
Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	Rp.	5.141.750
Peralatan Dapur Lainnya	Rp.	38.000.000
Jam dinding/meja	Rp.	5.719.000
Karpet	Rp.	200.325.000
Korden	Rp.	279.717.800
TV	Rp.	44.641.000
Kipas Angin	Rp.	560.000
AC	Rp.	23.250.000
Pigora	Rp.	1.280.000
Tape	Rp.	4.920.000
Alat-alat Rumah Tangga Lainnya	Rp.	9.850.000
Kamera	Rp.	276.899.000
Handycam	Rp.	77.427.500
Proyektor	Rp.	235.949.860
Amplifier/Mixer Audio	Rp.	85.109.500
Pengeras Suara	Rp.	2.160.000
Microphone	Rp.	374.385.000
Alat-alat Studio Lainnya	Rp.	44.003.500
Telepon	Rp.	2.085.000
Faximili	Rp.	1.773.000
Radio HF/FM (handy talkie)	Rp.	26.400.000
Alat-alat Komunikasi Lainnya	Rp.	1.550.000
Alat Ukur Ketebalan	Rp.	44.858.000
Sentolop/senter	Rp.	245.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.758.912.223</b>

Saldo peralatan dan mesin SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 13.758.912.223 dengan perincian sebagai berikut.

- Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2013 sebesar Rp **5.345.158.248,00** berasal dari:
  - ❖ Belanja Modal sebesar Rp **5.345.158.248,00**;
  - ❖ Belanja Pegawai sebesar Rp **00,00** serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00. Kedua belanja tersebut merupakan atribusi yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
- Penyesuaian sebesar Rp, **(41.030.050)** tersebut merupakan *belanja Modal nilainya dibawah dan diatas batas minimal kapitalisasi aset*

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
<b>(c) Gedung dan Bangunan</b>	<b>2.727.010.350,00</b>	<b>2.691.107.350,00</b>

Saldo gedung dan bangunan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.727.010.350,00 dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo awal</b>		
Gedung Kantor	Rp.	2.005.860.100,00
Gedung Rumah Jabatan	Rp.	148.245.000,00
Bangunan Gudang	Rp.	62.900.000,00
Bangunan Pagar	Rp.	235.267.500,00
Bangunan Tempat Parkir	Rp.	238.834.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.691.107.350,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Gedung Kantor	Rp.	30.503.000,00
Bangunan Monumen	Rp.	7.550.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>38.053.000</b>
<b>Penyesuaian/Koreksi</b>		
Bangunan Monumen	Rp.	(2.150.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>(2.150.000,00)</b>
<b>Penghapusan/Pengurangan</b>		
Gedung Kantor	Rp.	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Saldo akhir</b>		
Gedung Kantor	Rp.	2.036.363.100,00
Gedung Rumah Jabatan	Rp.	148.245.000,00
Bangunan Gudang	Rp.	62.900.000,00
Bangunan Monumen	Rp.	5.400.000,00
Bangunan Pagar	Rp.	235.267.500,00
Bangunan Tempat Parkir	Rp.	238.834.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.727.010.350,00</b>

- Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2013 sebesar Rp **38.053.000** berasal dari:
  - ❖ Belanja Modal sebesar Rp **38.053.000**;
  - ❖ Belanja Pegawai sebesar Rp0,00 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00. Kedua belanja tersebut merupakan atribusi yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
- Penyesuaian sebesar Rp. **(2.150.000,00)** merupakan *Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset*

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
<b>(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>	<b>467.190.500,00</b>	<b>425.182.500,00</b>

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 467.190.500,00 dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo awal</b>		
Jaringan Air Bersih/Air Minum	Rp.	2.400.000,00
Instalasi Listrik	Rp.	377.970.500,00
Instalasi Telepon	Rp.	44.812.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>425.182.500,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Instalasi Telepon	Rp.	44.368.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>44.368.000,00</b>
<b>Penyesuaian/Koreksi</b>		
Instalasi Telepon	Rp.	(2.360.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>(2.360.000,00)</b>
<b>Penghapusan/Pengurangan</b>		
Jaringan .....	Rp.	0,00
	Rp.	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Saldo akhir</b>		
Jaringan Air Bersih/Air Minum	Rp.	2.400.000,00
Instalasi Listrik	Rp.	377.970.500,00
Instalasi Telepon	Rp.	86.820.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>467.190.500,00</b>

- Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi tahun 2013 sebesar Rp 44.368.000,00 berasal dari Belanja Modal sebesar Rp. 44.368.000,00, Belanja Pegawai sebesar Rp0,00 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00. Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa merupakan atribusi untuk memperoleh Aset tersebut;
- Penyesuaian sebesar Rp. **(2.360.000,00)** merupakan *Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset*

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2010</u> <u>(Rp)</u>
<b>(e) Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 42.808.400,00 dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo awal</b>		
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp.	2.400.000,00
Buku Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	7.456.575,00
Peta/Atlas/Globe	Rp.	0,00
Buku Kepustakaan Lainnya	Rp.	6.301.825,00
Lukisan dan Foto	Rp.	3.320.000,00
Tanaman	Rp.	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>19.478.400,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp.	0,00

Buku Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	0,00
Peta/Atlas/Globe	Rp.	8.180.000,00
Buku Kepustakaan Lainnya	Rp.	6.900.000,00
Lukisan dan Foto	Rp.	6.450.000,00
Tanaman	Rp.	18.917.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>40.447.500,00</b>
<b>Penyesuaian/Koreksi</b>		
Tanaman	Rp.	(17.117.500,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>(17.117.500,00)</b>
<b>Penghapusan/Pengurangan</b>		
Tanaman	Rp.	0,00
<b>0,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(0,00)</b>
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp	<i>0,00</i>
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp	<i>(0,00)</i>
<b>Saldo akhir</b>	Rp	<b>0,00</b>
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp.	2.400.000,00
Buku Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	7.456.575,00
Peta/Atlas/Globe	Rp.	8.180.000,00
Buku Kepustakaan Lainnya	Rp.	13.201.825,00
Lukisan dan Foto	Rp.	9.770.000,00
Tanaman	Rp.	1.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>42.808.400,00</b>

➤ Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2013 sebesar Rp 23.330.000,00 berasal dari:

- ❖ Belanja Modal sebesar Rp.40.447.500,00;
- ❖ Penyesuaian sebesar Rp. (17.117.500,00) merupakan *Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset*

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(f) <b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 *NIHIL*

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
<b>4) Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2013 sebesar *NIHIL*

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
<b>5) Aset Lainnya</b>	<b>98.900.000,00</b>	<b>98.900.000,00</b>

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 98.900.000,00 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 98.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	98.900.000,00	98.900.000,00
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>98.900.000,00</b>	<b>98.900.000,00</b>

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2012 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total 30sset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total 30sset tahun 2010 (Rp0,00-Rp0,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
<b>(a) Aset Tak Berwujud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 merupakan .....  
(*ex : software/perangkat lunak*) dengan perincian sebagai berikut.

<b>Saldo awal</b>		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	98.900.000,00
.....	Rp.	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>98.900.000,00</b>
<b>Penambahan</b>		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
.....	Rp.	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
<b>Penyesuaian/Koreksi</b>		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
.....	Rp.	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
<b>Penghapusan/Pengurangan</b>		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	(0,00)
.....	Rp.	(0,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(0,00)</b>
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp	<i>0,00</i>
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp	<i>(0,00)</i>
<b>Saldo akhir</b>	Rp	<b>98.900.000,00</b>

Penambahan Aset Tak Berwujud (*jika ada*) sebesar Rp0,00 terdiri dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp0,00 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00. Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa tersebut merupakan atribusi yang digunakan untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud tersebut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
<b>(b) Aset Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 *NIHIL*

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
<b>b. Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kewajiban SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 adalah NIHIL.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
<b>1) Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 0,00 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
<b>2) Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2013 adalah NIHIL

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
<b>c. Ekuitas Dana</b>	<b>30.558.671.809,00</b>	<b>25.083.774.975,00</b>

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 sebesar **Rp 30.558.671.809,00** dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
<b>1) Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>118.250.336,00</b>	<b>48.722.700,00</b>

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 118.250.336,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	0,00
(b)	Cadangan Persediaan	118.250.336,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
(d)	.....	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>118.250.336,00</b>

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
<b>2) Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>30.440.421.473,00</b>	<b>25.035.052.275,00</b>

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 30.440.421.473,00 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	30.440.421.473,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>30.440.421.473,00</b>

## 2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
<b>a. Belanja</b>	<b>30.256.780.202,00</b>	<b>23.699.851.787,00</b>

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2013 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2013 sebagai berikut.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
<b>1) Belanja Operasi</b>	<b>24.788.753.454,00</b>	<b>22.229.981.787,00</b>

Belanja Operasi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2013 Rp 24.788.753.454,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
(a)	Belanja Pegawai	4.632.465.804,00	4.097.313.840,00	3.567.616.449,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	23.640.653.300,00	20.691.439.614,00	18.662.365.338,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.273.119.104,00</b>	<b>24.788.753.454,00</b>	<b>22.229.981.787,00</b>

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar realisasi tahun 2013 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.067.280.804,00</b>	<b>2.909.578.840,00</b>	<b>2.993.120.549,00</b>
	Gaji dan Tunjangan	2.871.380.804,00	2.809.778.840,00	2.827.220.549,00
	Tambahan Penghasilan PNS	195.900.704,00	99.800.000,00	105.900.000,00
<b>1.</b>	<b>Jumlah Belanja Tak Langsung (1)</b>	<b>3.067.280.804,00</b>	<b>2.909.578.840,00</b>	<b>2.933.120.549,00</b>
	<b>Belanja Langsung</b>			
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.565.185.000,00</b>	<b>1.187.735.000,00</b>	<b>634.495.900,00</b>
	Honorarium PNS	260.855.000,00	125.735.000,00	155.875.000,00
	Honorarium Non PNS	1.292.500.000,00	1.062.000.000,00	478.620.900,00
	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>23.640.653.000,00</b>	<b>20.691.439.614,00</b>	<b>18.662.365.338,00</b>
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	284.073.500,00	225.211.500,00	94.655.775,00
	Belanja Jasa Kantor	1.457.496.400,00	1.270.643.374,00	545.017.940,00
	Belanja Premi Asuransi	200.000.000,00	198.500.000,00	365.000.000,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	387.225.500,00	323.803.549,00	356.668.953,00

	Belanja Cetak dan Penggandaan	682.063.950,00	485.987.430,00	359.380.330,00
	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang /Parkir	203.750.000,00	159.000.000,00	58.500.000,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	80.000.000,00	79.827.000,00	0,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	291.250.000,00	242.740.000,00	24.140.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	495.562.500,00	477.824.500,00	254.348.250,00
	Belanja Pakaian dinas dan atributnya	248.286.000,00	242.000.000,00	231.440.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	16.210.176.050,00	14.510.022.261,00	13.027.366.090,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.118.000.000,00	991.420.000,00	919.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan	132.370.500,00	14.710.000,00	158.510.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi	924.061.000,00	647.500.000,00	566.000.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan dan ANggota DPRD	913.500.000,00	822.250.000,00	1.688.550.000,00
	Belanja Transport Lokal Non PNS	12.837.900,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Jumlah Belanja Langsung (2)</b>	<b>25.205.838.300,00</b>	<b>21.879.174.614,00</b>	<b>19.296.861.238,00</b>
	<b>Jumlah 1 dan 2</b>	<b>28.273.119.104,00</b>	<b>24.788.753.454,00</b>	<b>22.229.981.787,00</b>

31 Desember 2013  
(Rp)

31 Desember 2012  
(Rp)

**2) Belanja Modal**

**6.062.992.000,00**

**1.469.870.000,00**

Belanja Modal SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2013 Rp 5.468.026.248,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
	<b>Jumlah 1</b>			
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin</b>			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.959.600.000	2.918.553.198	1.206.780.000
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	10.000.000	9.000.000	-
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	125.000.000	120.446.000	-
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	304.500.000	289.077.340	-
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	299.250.000	288.672.000	184.770.000
	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	443.150.000	386.965.000	25.420.000
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	43.310.000	24.409.550	-
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	562.182.000	552.915.000	1.950.000

	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	758.000.000	732.620.160	50.950.000
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	25.000.000	22.500.000	-
	<b>Jumlah 2</b>	<b>5.529.992.000</b>	<b>5.345.158.248</b>	<b>1.469.870.000</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung</b>			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	432.000.000	30.503.000	-
	<b>Jumlah 3</b>	<b>432.000.000</b>	<b>30.503.000</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>			
	Belanja Modal Sarana Fasilitas Jalan	9.900.000	7.550.000	-
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	48.000.000	44.368.000	-
	<b>Jumlah 4</b>	<b>57.900.000</b>	<b>51.918.000</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya</b>			
	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	17.600.000	15.080.000	-
	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	6.500.000	6.450.000	-
	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	19.000.000	18.917.500	-
	<b>Jumlah (5)</b>	<b>43.100.000</b>	<b>40.447.500</b>	<b>-</b>
	<b>Total Belanja Modal</b>	<b>6.062.992.000</b>	<b>5.468.026.748</b>	<b>1.469.870.000</b>

Jumlah tersebut termasuk:

- Realisasi Belanja Modal **Rp. 5.468.026.748** berasal dari Belanja yang terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 5.345.158.248, Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung Rp.30.503.000, Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 51.918.000 dan Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya Rp. 40.447.500

Blitar, 13 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN BLITAR

**(Dra. LISMAWATI YUNAIKA, MSi)**

NIP. 19620609 198603 2 005